

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melihat beberapa penelitian terdahulu untuk melihat penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk mengkaji hubungan dan perbedaan tingkat keparahan kemiskinan.

Hervita Muda (2015), melakukan penelitian tentang “Analisis Determinan Tingkat Keparahannya Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2011-2017”. Variabel yang digunakan adalah variabel indeks gini, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan belanja total. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel belanja total berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

Penelitian Achmad Kurniawan (2014) menganalisis tentang “Analisis Determinan Tingkat Keparahannya di Jateng 2011-2015” yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur dan variabel DPRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Juhar dan Rita (2018), melakukan penelitian tentang “Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel” yang menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kedalaman kemiskinan di Sumatera Utara.

Yuli Dahliana (2015), menganalisis penelitian tentang “Analisis Pengangguran, PDRB, IPM terhadap Kemiskinan di Jawa Timur 2008-2012”. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa PDRB dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

La ode (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2017)”, hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2017.

Endah Nor (2014) melakukan penelitian mengenai “ Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016” yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dapat diartikan bahwa kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat serta orang yang menganggur belum tentu masyarakat miskin dan pendapatannya rendah.

Himawan, Agnes, dan Jacline (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh DPRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)”. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.

Ridzky (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau

Jawa Tahun 2009-2016”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Hasil yang didapatkan adalah PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa sementara pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Faza (2018) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan (2010-2015)”, menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan dan variabel pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan.

Sandi Adhiatma (2013) menganalisis penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di DIY 2011-2015”, hasilnya adalah tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di DIY.

Masood S. Awan dan Muhammad Waqas (2011) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan sering diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia pada aspek primer dan aspek sekunder. Yang dimaksud aspek primer dapat berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Setiap negara memiliki

definisi masing-masing mengenai kemiskinan karena kondisi miskin pada setiap negara bersifat relatif yang dapat dilihat dari segi tingkat kesejahteraan, keadaan sosial dan kondisi perekonomian suatu negara. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi pada setiap negara terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Masing-masing ukuran kemiskinan di setiap negara berbeda-beda. Tingkat pendapatan, daya beli, kondisi kesehatan, status pendidikan, tingkat pengangguran dan keterbelakangan dapat menjadi ukuran kemiskinan. Disamping itu hal-hal yang dapat dikaitkan dengan kemiskinan adalah rendahnya kualitas kesehatan, tingkat pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan dan sulitnya akses lapangan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai miskin.

Kurangnya pendapatan dan aset dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal serta yang berkaitan dengan standar kualitas hidup layak seseorang merupakan penyebab dari kemiskinan (*World Bank*, 2004).

Kondisi kemiskinan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kondisi dimana individu atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti papan, sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan karena pendapatannya dibawah garis kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Terbentuknya kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga tidak menjangkau seluruh masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan.

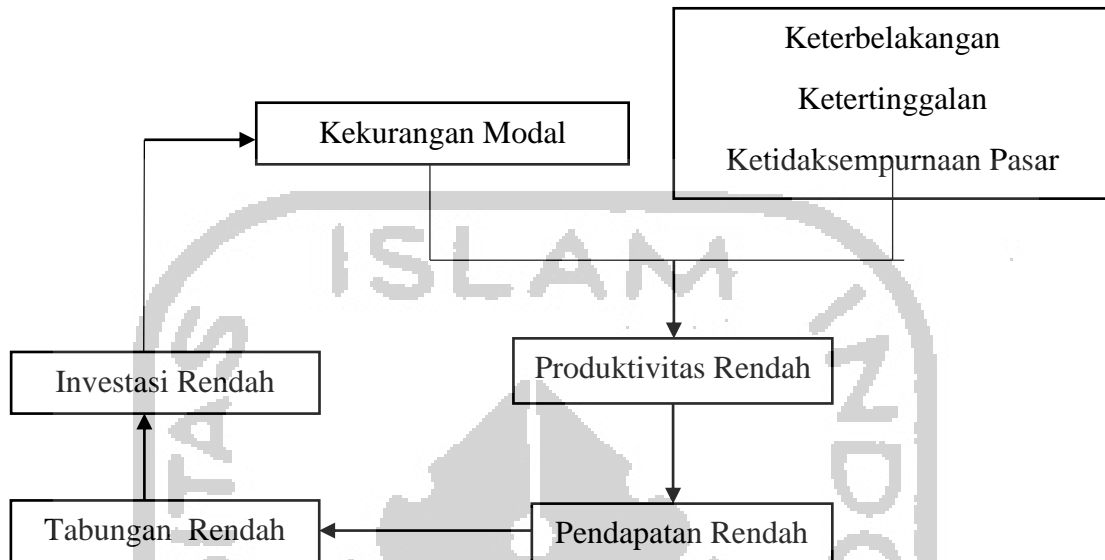
3. Kemiskinan Kultural

Terbentuknya kondisi miskin karena faktor budaya masyarakat atau sikap seseorang yang tidak ingin berusaha untuk memperbaiki tingkat kualitas hidupnya.

4. Kemiskinan Struktural

Terbentuknya kondisi miskin karena minimnya akses terhadap sumber daya pada sistem sosial budaya atau sosial politik yang kurang mendukung pembebasan kemiskinan dan berpeluang menyebabkan kemiskinan.





Gambar 2. 1
Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi (Sharp ,2000) yaitu:

- a. Secara mikro, munculnya kemiskinan dari adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya sehingga menimbulkan ketimpangan pada penduduk miskin yang hanya memiliki terbatasnya sumberdaya dan rendahnya kualitas.
- b. Perbedaan kualitas sumber daya manusia menyebabkan munculnya kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya produktivitas yang kemudian dapat mengakibatkan upah rendah. Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan oleh pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, dan adanya diskriminasi atau keturunan.

- c. Perbedaan akses dalam modal dapat memunculkan kemiskinan yang bermula dari teori lingkaran setan kemiskinan. (Nurkse, 1953), kemiskinan banyak terjadi di negara berkembang dikarenakan oleh rendahnya produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan yang dimiliki masyarakat rendah. Dengan pendapatan yang rendah masyarakat tidak dapat menabung karena pendapatan yang dimilikinya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya (pembentukan modal adalah tabungan).

2.2.2 Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 1994). Pengangguran terbuka adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok penduduk usia kerja yang ingin bekerja, sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau tidak ingin bekerja karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik atau sudah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Simanjuntak (1998), terdapat 3 (tiga) jenis faktor yang menimbulkan pengangguran yaitu:

1. Pengangguran Friksional

Kondisi dimana adanya kesenjangan informasi, waktu, kondisi geografis pada pencari kerja dan lowongan pekerjaan sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran.

2. Pengangguran Struktural

Terjadinya pengangguran akibat dari para pencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan lowongan pekerjaan.

3. Pengangguran Musiman

Adanya perubahan musim mengakibatkan terjadinya pengangguran. Umumnya terjadi di sektor pertanian pada saat musim tanam atau musim panen karena setelah musim tersebut mereka akan menganggur.

Menurut Edgar O. Edwards (Arsyad, 2004), pengelompokan pengangguran perlu memperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran yaitu sebagai berikut:

1. Waktu

Dimana mereka ingin bekerja lebih lama pada jam kerjanya.

2. Produktivitas

Dimana sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan rendah sehingga mengakibatkan produktivitas yang rendah.

3. Intensitas Pekerjaan

Dimana intensitas dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh kesehatan dan gizi makanan.

Menurut Sadono Sukirno (2002), terdapat dua aspek dari akibat baik buruknya pengangguran:

a. Akibat buruknya pada kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang tinggi tidak memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari akibat

buruknya yang ditimbulkan pada masalah pengangguran. Akibat buruk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran menyebabkan tidak tercapainya tingkat kemakmuran yang maksimal. Karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan riil (nyata) yang diperoleh masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya) sehingga menyebabkan tingkat kemakmuran rendah.
2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak yang diterima pemerintah rendah. Karena pengangguran terjadi akibat dari tingkat kegiatan ekonomi yang rendah. Jika kegiatan ekonomi rendah maka pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah juga semakin rendah sehingga dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berkurang yang kemudian akan menghambat kegiatan pembangunan.
3. Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengangguran menimbulkan dua akibat buruk pada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran pada tenaga buruh diiringi oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran dikarenakan keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah sehingga menyebabkan keinginan untuk berinvestasi berkurang.

b. Akibat buruknya pada individu dan masyarakat

Pengangguran akan berpengaruh terhadap kondisi kehidupan individu dan kestabilan sosial masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan dari pengangguran:

1. Pengangguran menyebabkan seseorang kehilangan pendapatan dan mata pencahariannya.
2. Pengangguran bisa menyebabkan hilangnya keterampilan yang dimiliki. Keterampilan akan diperoleh saat mengerjakan sesuatu pekerjaan dan keterampilan dapat dipertahankan ketika digunakan terus menerus dalam praktek.
3. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dimana saat kegiatan ekonomi lesu dan tingginya pengangguran menimbulkan masyarakat memiliki rasa tidak puas terhadap pemerintah.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan unit ekonomi disuatu wilayah atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan unit usaha pada suatu wilayah tertentu. Kondisi perekonomian dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui nilai PDRB. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun yang digunakan untuk melihat struktur ekonomi disuatu daerah. Sedangkan PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan satu tahun tertentu sebagai dasar yaitu tahun dasar 2010 yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dari tahun ke tahun.

Menurut Bank Indonesia (2011), terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan PDRB yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit produksi. Dalam perhitungan pendapatan pada pendekatan produksi dilihat dari jumlah seluruh sektor industri yang ada. Sektor industri tersebut adalah:

a. Pertanian

Dalam pertanian mencakup tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan seperti jagung, ketela, padi, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman perkebunan seperti karet, kapas, kakao, kopi, kelapa sawit, jahe, tembakau, cengkeh dan lain-lain.

b. Peternakan

Dalam peternakan mencakup pembibitan dan budidaya hewan ternak unggas yang diambil hasilnya.

c. Kehutanan

Dalam kehutanan mencakup kayu-kayuan dan komoditi lainnya.

d. Perikanan

Dalam perikanan mencakup kegiatan pembenihan dan budidaya ikan serta biota air tawar maupun laut.

e. Pertambangan dan Penggalian

Dalam sektor pertambangan mencakup gas bumi, minyak dan non migas seperti emas perak. Sedangkan penggalian seperti pasir, batu kali, batu gunung dan lain-lain.

f. Industri Pengolahan

Industri pengolahan mencakup pengolahan migas dan non migas.

g. Listrik, Air dan Gas

Dalam sektor ini PLN sebagai penyaluran tenaga listrik, air bersih melalui proses pembersihan hingga perindustrian, dan penyaluran gas dari Perum Gas Negara.

h. Kontruksi

Dalam sektor kontruksi mencakup pembuatan pembangunan, pemasangan dan perbaikan kontruksi yang dilakukan.

i. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Dalam perdagangan mencakup perdangan besar dan eceran. Sedangkan hotel berupa tempat penginapan dan restoran yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.

j. Pengangkutan

Pengangkutan mencakup kegiatan pengangkutan menggunakan alat angkut.

k. Komunikasi

Sektor komunikasi mencakup pos, telekomunikasi, giro dan jasa penunjang komunikasi lainnya.

l. Keuangan dan Jasa Perusahaan

Sektor pada industri ini mencakup bank, Lembaga keuangan non bank, dan jasa perusahaan.

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB mencakup semua komponen pada permintaan akhir yang terdiri dari:

- a. Konsumsi pemerintah
- b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta nirlaba
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan inventori
- e. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah barang balas jasa seperti upah, gaji, sewa tanah bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung maupun pajak penghasilan yang diterima oleh faktor produksi disuatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

2.2.4 Tingkat Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah)

Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan saling berkaitan. Dimana tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan dapat

mengembangkan potensi seseorang. Pendidikan merupakan prioritas dalam pembangunan masa depan karena dengan pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas. Karena pendidikan adalah investasi sumber daya manusia dalam pembangunan karakter untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang tinggi berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dengan begitu maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mempengaruhi kemiskinan. Tingkat kemiskinan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Namun dengan tersedianya pendidikan yang memadai maka penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik sehingga dapat keluar dari status miskin di masa depan (Anderson, 2012). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mankiw (1992) yaitu jika meratanya investasi pendidikan baik masyarakat yang berpendapatan rendah maka akan mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini diprosi dengan rata-rata lama sekolah.

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal)

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah menyediakan sarana dan prasarana berupa barang publik dan pelayanan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja modal merupakan pengeluaran belanja pemerintah untuk pembelian aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari setahun untuk kepentingan publik. Pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja modal yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun masih terjadi

pengeluaran pemerintah yang belum menyentuh langsung kepada penduduk miskin. Maka dengan begitu pemerintah harus memperbaiki langkah-langkah untuk menggunakan sumber keuangan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu dapat mengatasi kemiskinan yang menjadi masalah bagi pemerintahan daerah.

2.3 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan, memperluas lapangan pekerjaan, dan pemerataan pendapatan merupakan tujuan utama dalam pembangunan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya *part time* selalu berada pada kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 1997). Setiap orang yang bekerja secara penuh merupakan orang kaya sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan merupakan orang miskin. Tetapi hal tersebut merupakan anggapan yang salah. Kadangkala masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan selalu mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dan mereka memilih untuk menolak pekerjaan yang dirasanya rendah karena tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya yang disertai dengan adanya sumber-sumber lain yang dapat membantu untuk sumber keuangannya yang lebih baik. Hal tersebutlah yang disebut mengangur tetapi belum tentu miskin.

Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang karena jika masyarakat menganggur maka mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan pendapatan sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi pengeluaran konsumsinya. Makah hal tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun akibat dari menganggur yang kemudian berujung pada kemiskinan. Tingkat kemiskinan sensitif pada keadaan ekonomi, dimana pada saat pengangguran meningkat maka menyebabkan kemiskinan pun meningkat (Hoover & Wallace, 2003).

2.3.2 Pengaruh Variabel PDRB terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai tolak ukur indikator dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono,2010). Jika tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan nilai PDRB yang tinggi maka hal itu memperlihatkan daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Namun pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui PDRB saja tetapi juga harus memperhatikan distribusi pendapatan siapa saja yang menikmati hasil-hasilnya. Jika PDRB menurun maka mengakibatkan menurunnya kualitas konsumsi rumah tangga. Menurunnya kualitas konsumsi rumah tangga akibat dari terbatasnya pendapatan. Sehingga rumah tangga miskin akan mengubah pola makanan pokoknya yang lebih murah dan mengurangi jumlah yang dikonsumsi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang

akan mengakibatkan kemiskinan. Indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi memiliki efektif dapat mengurangi kemiskinan. Dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi harus merata dan menyebar pada semua golongan pendapatan atas, menengah, dan termasuk golongan penduduk miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).

2.3.3 Pengaruh Variabel Belanja Modal terhadap Kemiskinan

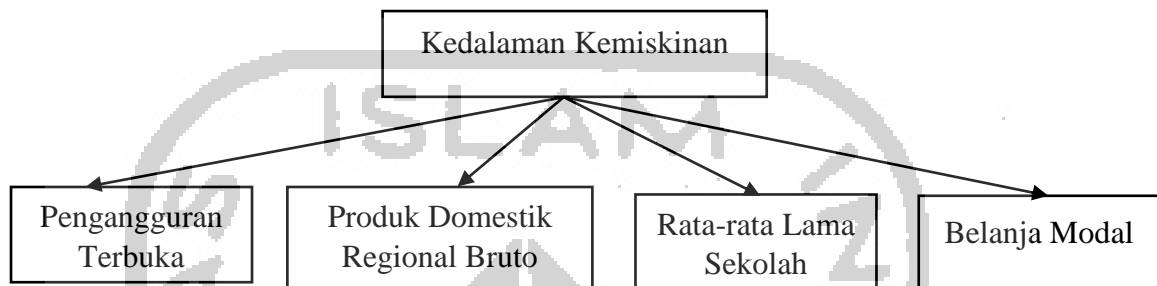
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berapa besarnya pengeluaran pemerintah dalam pengalokasian APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. APBD dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan karena APBD merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik yang memadai. Tujuan utama APBD dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan begitu dapat mengurangi kemiskinan (Bastian, 2006).

2.3.4 Pengaruh Variabel Pendidikan terhadap Kemiskinan

Pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan dimana tidak terjangkaunya pendidikan bagi penduduk miskin maka akan menyebabkan produktivitas kaum miskin rendah sehingga akan semakin meningkatkan kemiskinan. Pendidikan merupakan penyelamat diri dari kondisi kemiskinan di berbagai negara (Todaro,1994). Maka tingkat pendidikan yang tinggi sangatlah penting dalam mengatasi kemiskinan karena jika tingkat pendidikan tinggi maka produktivitas masyarakat juga tinggi sehingga tingkat kemiskinan menurun.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan tingkat kedalaman kemiskinan dipengaruhi oleh :



2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2012-2018.
2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2012-2018.
3. Diduga Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2012-2018.
4. Diduga Tingkat Pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh negatif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2012-2018.